

MANGKUBUMI SANG ARSITEK KOTA YOGYAKARTA

Baha` Uddin dan Dwi Ratna Nurhajarini

Prodi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Balai Pelestarian Nilai Budaya, D.I. Yogyakarta
Jalan. Brigjen Katamso No. 139 Yogyakarta
ratnadwi303@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang awal terbentuknya Kota Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I. Artikel ini disusun dengan menggunakan studi pustaka dan artefak tinggalan sejarah yang menjadi simbol-simbol kota sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan, Pangeran Mangkubumi membangun Kota Yogyakarta dengan pertimbangan geografis, sosial - budaya, pertahanan dan politis, serta kota yang penuh makna filosofi. Kota dibuat berdasar fungsi – fungsi yang mewadahi aktivitas warga masyarakat, seperti yang terwujud dalam artefak yang sampai sekarang masih dapat dilihat dan menjadi urban heritage di Yogyakarta. Bangunan – bangunan itu adalah kraton itu sendiri yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan; masjid gedhe Kauman sebagai ruang religi dan moral; Pasar Beringharjo sebagai ruang ekonomi dan Alun-alun sebagai ruang publik. Untuk menghasilkan narasi dalam artikel ini memakai metode sejarah dari pengumpulan sumber hingga penulisan.

Kata kunci: Kota Yogyakarta, kota istana, Kraton Yogyakarta, Hamengku Buwono I, simbol kota

MANGKUBUMI THE ARCHITECH OF YOGYAKARTA

Abstract

This research discusses about the initial formation of Yogyakarta city built by Sutlan Hamengku Buwono I. This article was conducted using literary research and historical artefact as city symbols as the data. The result shows that Pangeran Mangkubumi built Yogyakarta city in the consideration of geographical, social, cultural, defensive and political, and philosophical meaningful aspects as well. The city was built based on functions as the base of social activities, like the expression of the artefacts up to now as the urban heritage in Yogyakarta. The buildings are kraton itself in function as the centre of governance; Kauman Great Mosque as the religion and moral space; Beringharjo traditional market as economical space and alun-alun (great yard) as public space. The narration of this article was used historical and collecting sources methods.

Keywords: Yogyakarta city, kingdom city, Kraton Yogyakarta, Hamengku Buwono I, city symbol.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki tradisi dan akar sejarah yang panjang. Terbentuknya negara kebangsaan Indonesia di dahului dengan embrio-embrio kekuasaan dan kebangsaan yang lebih kecil. Sebelum negara bangsa Indonesia terbentuk, di wilayah itu mengalami masa yang disebut zaman feodal, dimana kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini berdaulat. Kesultanan Yogyakarta adalah salah satu dari embrio kekuatan politik kebangsaan sebelum terbentuknya Indonesia. Oleh karena itu mempelajari sejarah nasional Indonesia juga harus dimulai dengan mempelajari embrio kebangsaan itu, yaitu sejak berdirinya kerajaan-kerajaan nusantara. Dari periode ini kita dapat mempelajari kesinambungan sejarah yang panjang itu (Margana, S. 2014:1).

Bertahtanya Sultan Hamengku Buwana I di Kasultanan Yogyakarta menjadi ciri lahirnya sebuah era kasultanan penerus Dinasti Mataram. Menurut Djoko Suryo (2011: 5) berdirinya kasultanan tersebut memiliki ciri, identitas dan peran unik sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kebudayaan Jawa, yang pada masa kemudian mampu berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan Indonesia modern yang berlangsung hingga masa kini. Hal itu ditambah juga dengan predikat istimewa yang di sandang Yogyakarta. Oleh karena itu menarik untuk melihat Kota Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat adalah apa yang mendasari Sultan Hamengku Buwono I membangun Kota Yogyakarta yang penuh dengan makna filosofi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dilihat dari aspek historis.

Secara metodologis penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian, yakni pemilihan topik; pengumpulan sumber; verifikasi (kritik sumber); interpretasi; serta penulisan (Kuntowijoyo: 1995: 89). Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan memanfaatkan artefak sebagai sumber data. Pengumpulan sumber pustaka dilakukan di beberapa tempat, yakni perpustakaan di DIY (Perpustakaan BPNB Yogyakarta: Perpustakaan Kota Yogyakarta; Perpustakaan Daerah Yogyakarta; Perpustakaan Kolese Ignatius Kotabaru, dan Perpustakaan UGM).

Tentunya sudah banyak tulisan yang membahas tentang Mangkubumi maupun tentang Kraton Yogyakarta dari berbagai sudut pandang, seperti Ricklefs¹, Surjomihardjo², Notosuroto³, dan artikel ini membahas salah satu aspek yang sejak awal menjadi perhatian Pangeran Mangkubumi dan tata kota tersebut sampai sekarang artefaknya menjadi ikon Yogyakarta.

II. MANGKUBUMI DAN TERBENTUKNYA KASULTANAN YOGYAKARTA

Pangeran Mangubumi mempunyai nama kecil BRM Sujono, putera Sunan Amangkurat IV (Jawi) dengan BMA Tejawati. Saudara seayahnya antara lain BRM Damar (Pangeran Aryo Mangkunegoro, ayah dari RM Said yang kemudian menjadi Sambernyowo/ KGPAAMangkunegoro I) GRM Proboyoso, yang kemudian menjadi Sunan Paku Buwono II). BRM Sujono, meskipun putera raja, namun ia hidup sederhana, aktif beribadah mendekati diri pada Tuhan Allah SWT, serta mendalami ilmu yang bermanfaat bagi kepribadiannya. Dalam *Serat Cebolek* dikisahkan bahwa Pangeran Mangkubumi

1 Ricklefs, M.C. Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749- 1792. Sejarah Pembagian Jawa. Yogyakarta: Matabangsa, 2002. Ricklefs memfokuskan penelitiannya tentang birokrasi dan interaksi sosial politis di lingkungan istana. Walaupun fokusnya pada birokrasi yang lebih condong pada urusan politik, namun sosok Mangkubumi tetap menjadi fokus dalam kajian tersebut.

2 Surjomihardjo, A. Kota Yogyakarta 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000. Fokus kajian pada buku ini adalah tentang perubahan sosial yang terjadi di Yogyakarta yang akar-akar pembentukannya telah dimulai sejak abad ke-19. Modernitas di tanah kerajaan telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. .

3 Notosuroto, *Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986.

sangat rajin beribadah, sholat lima waktu berjamaah, puasa senin-kamis, mengaji kitab suci Al Qur'an, dan suka beramal sholeh (kebajikan). Selain itu, Pangeran Mangkubumi juga senang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengadakan pendekatan pada masyarakat, dan memberikan pertolongan pada yang tidak mampu dan lemah (Naskah Akademik Hari Jadi Yogyakarta, 2017). Menurut Santosa (2008: 32) disebutkan bahwa Pangeran Mangkubumi sangat dekat dengan Sunan Pakubuwono II, hal itu karena kepribadian, kecerdasan dan kecakapan teknis yang dimiliki Pangeran Mangkubumi. Pembangunan Kraton Kartosura dan Surakarta memperoleh sentuhan tangan dan pemikiran Pangeran Mangkubumi, bahkan pembangunan beberapa bagian kraton yang sangat pribadi (Pajungutan dan Purwa Lulut) yang hanya boleh dimasuki oleh raja dan orang terdekat yang dikehendaki raja, dipercayakan pada Pangeran Mangkubumi.

Pangeran Mangkubumi sebagai raja pertama Kasultanan Yogyakarta memakai gelar *Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati Ing Ngalaga, Abdurahman Sayidin Panatagama Kalipatulah*. Gelar tersebut menunjukkan bahwa raja Kasultanan Yogyakarta secara simbolis dan filosofis mencerminkan kerangka konsep tentang raja, kerajaan, panglima perang dan sifat keilahian dalam pandangan Islam.

Loyalitas Pangeran Mangkubumi pada Mataram tinggi, ia sering ditugasi untuk memadamkan pemberontakan, ia pun juga memiliki sikap patriotik, yaitu tidak suka adanya campur tangan VOC Belanda terhadap Mataram, dan menyayangkan kelemahan Sunan Paku Buwono II yang memberikan peluang pada VOC untuk menguasai wilayah Mataram. Sebagai saudara, Pangeran Mangkubumi sering memberikan saran agar Sunan Paku Buwono II tidak memberikan kesempatan pada Belanda untuk menggerogoti Mataram (Moedjanto, 2001).

Wilayah yang sekarang bernama Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang. Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari dibangunnya Kraton Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 antara Mangkubumi, Paku Buwana III dan pihak Kompeni (Notosuroto, 1986: 9). Dengan Perjanjian Giyanti Pangeran Mangkubumi bergelar sultan yakni *Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati Ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Kalipatulah* (Ricklefs, 2002: 115-122). Menurut Soedarsono (1997:102-104) arti gelar tersebut adalah *Kanjeng* (Yang dipertuan); *Sultan* (Raja); *Hamengkubuwana* (Yang memelihara/melindungi dunia); *Senapati Ing Ngalaga* (Pimpinan utama dari angkatan perang); *Ngabdurahman* (Abdi dari Tuhan), *Sayidin* (Pimpinan agama), dan *Kalipatulah* (Pengganti dari Nabi Muhammad).

Dengan adanya Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755 ini berarti berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai negara baru dari *Pilahan* atau *Palihan Nagari Mataram*. *Palihan Nagari* ini diperingati dengan *candra sengkala* yang berbunyi *Tunggal Pangesti Rasaning Janmi* (1681). Dalam pembagian negara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono mendapatkan bagian:

1. Separuh dari wilayah *Negaragung* yaitu daerah-daerah sekeliling Nagari (kedudukan Raja=Kraton), luasnya mencakup 53100 *karya*, meliputi wilayah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede.

2. Separuh dari wilayah *Manca Negara*, luasnya mencakup 33950 *karya*, meliputi Madiun, Magetan, Caruban, separuh Pacitan, Kertosono, Kalongbret, Ngrowo (Tulungagung), Djapan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras-Karas, Selo, Warung, dan Grobogan (Houben, 1994: 4).

Kesepakatan lain antara Pangeran Mangkubumi dengan Kompeni menyangkut sewa tanah di *daerah* pesisir adalah Pangeran Mangkubumi merelakan daerah pesisir disewa VOC seharga 20.000 real dengan kesepakatan dibagi dua: 10.000 real untuk Pangeran Mangkubumi dan 10.000 real untuk

Paku Buwono III. Dengan demikian Pangeran Mangkubumi sudah mendapatkan modal yang berharga untuk memulai merintis sebuah negara. Oleh karena itu untuk menyempurnakannya Pangeran Mangkubumi membutuhkan sebuah ibu kota sebagai tempat kedudukan istana.

Dua hari setelah Perjanjian Giyanti, tepatnya pada tanggal 15 Februari 1755, Hartingh, Sultan Hamengku Buwono dan beberapa pengawalnya berangkat ke Jatisari yang berada di titik pertengahan antara Surakarta dan Giyanti, untuk bertemu dengan Paku Buwono III dengan tujuan melakukan rekonsiliasi. Di Jatisari kedua penguasa Jawa yang adalah paman dan keponakan itu, bertemu sebagai orang yang berkedudukan sama. Sultan Hamengku Buwono tiba terlebih dahulu dan mengambil tempat di sebuah meja tempat Hartingh memimpin pertemuan itu nantinya. Paku Buwono III tidak lama kemudian tiba dengan iringan gamelan.

Kedua raja itu berjanji akan saling bahu membahu untuk melawan RM Said. Pada kesempatan itu, Paku Buwono III menghadiahkan Sultan Hamengku Buwono Keris Kyai Kopek, yang diturunkan dari Sunan Kalijaga, dan kemudian menjadi *pusaka ageng* Kasultanan Yogyakarta (Ricklefs, 2002: 118, Soedarsono, 1997: 101). Selain itu, pada pertemuan di Jatisari tersebut juga terdapat sebuah kesepakatan penting yang berhubungan dengan tradisi budaya yang masing-masing akan dikembangkan oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada kesempatan itu disepakati bahwa Sultan Hamengku Buwono yang belum memiliki Kraton, akan membawa, menjaga, merawat, melestarikan, dan mengembangkan tradisi budaya dan adat istiadat Kerajaan Mataram sebelum terjadinya peristiwa *Palihan Nagari*. Sementara itu Sunan Paku Buwono III memilih akan membangun sebuah kebudayaan dan tradisi budaya baru yang tetap berlandaskan pada budaya lama.

Satu bulan pasca Perjanjian Giyanti, Sultan Hamengku Buwono kemudian memproklamasikan *Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat (separo Nagari Mataram)* pada hari Kamis Pon, 29 Jumadil'awal Be 1680 atau 13 Maret 1755. Pada kesempatan itu Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan *Ngayogyakarta Hadiningrat* yang berlokasi di hutan Beringan (disebut juga Beringin atau Pabringan) (Nurhajarini, dkk., 2012: 36) dimana terdapat ada sebuah Umbul (mata air) Pachetokan, dan suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang diprakarsai pembuatannya oleh Sunan Amangkurat IV, namun sebelum bangunan terwujud Sunan Amangkurat IV meninggal. Pembangunan kemudian dilanjutkan oleh Sunan Paku Buwana II sampai terwujud sebuah pesanggrahan yang kemudian diberi nama *Ayodhya* (Revianto, 2008: 63) Setelah penetapan tersebut, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan rakyat untuk memabat hutan tadi untuk didirikan kraton yang dimulai pada Kamis Pon, 13 Suro Tahun Wawu 1681 atau 9 Oktober 1755. Sebelum kraton itu selesai dibangun, Sultan Hamengku Buwono berkenan menempati Pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Pembangunan pesanggrahan ini juga tidak terlepas dari aspek pertahanan karena letaknya disamping sebuah gunung gamping yang secara tidak langsung memberi perlindungan kuat kepada penghuni pesanggrahan. Letak gunung Gamping berada di sebelah timur laut pesanggrahan. Di dalam gunung gamping yang membujur ke Timur, terdapat lubang semacam gua buatan yang membujur sepanjang gunung gamping. Gua ini sengaja dibuat untuk tujuan perlindungan dan benteng pertahanan karena pintunya yang ada di sebelah Barat berhubungan langsung dengan pesanggrahan.

Menilik sisa-sisa bangunan Pesanggrahan Ambar Ketawang yang cukup kokoh dan besar, agaknya bangunan ini sudah ada sebelum peristiwa Perjanjian Giyanti, karena kecil kemungkinan dalam waktu yang sangat singkat membangun sebuah bangunan yang kokoh dan megah. Sebelum bernama Pesanggrahan Ambarketawang, bangunan ini dikenal dengan nama *Purapara* yang artinya bangunan untuk tempat istirahat pada waktu orang tengah dalam bepergian (*papara*). Jika informasi ini dihubungkan dengan sejarah hutan Beringan, yang berasal dari kata *Pabringan*, yaitu tempat untuk memberi tanda-tanda pada waktu orang ramai-ramai berburu hewan di hutan (pada masa Mataram), maka besar kemungkinan keberadaan bangunan Pesanggrahan Ambarketawang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Pada masa itu bangunan ini berfungsi untuk pesanggrahan pada waktu Raja dengan pengiringnya sedang berburu (*mbedag-pikat*) hewan yang ada di hutan Beringan.

Hamengkubuwana I menyusun birokrasi pemerintahan mengikuti tradisi Kerajaan Mataram. Secara hirarkis dari pusat ke daerah melalui pejabat-pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas pemerintahan kerajaan. Di tingkat pusat, sultan sebagai kepala pemerintahan kerajaan sehari-harinya dibantu oleh dua orang *Pepatih Dalem* (*Patih Jaba* dan *Patih Jero*), dan delapan *Kenayakan*. Di tingkat daerah, para bupati beserta pejabat lokalnya memiliki tanggungjawab untuk menangani tugas pemerintahan di wilayahnya masing-masing (Suryo:2011:6).

Untuk bupati yang berjumlah delapan, sehingga dikenal dengan nama *nayaka wolu*, juga mendapatkan tempat tinggal. Delapan bupati ini dibagi menjadi empat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, antara lain yaitu: Bupati *Nayaka Jaba* yang mengurus agraria, menempati Kampung Bumijo dan Sitisewu. Penumping dan Numbakanyar untuk urusan keprajuritan. Bupati *Nayaka Jero*, yang mengurus kepamongpraajaan, di antaranya *Keparak Kiwa* dan *Keparak Tengen*, dan yang bertugas mengurus keuangan yaitu *Gedhong Kiwa* dan *Gedhong Tengen*.

III. KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT: KOTA ISTANA

Penelitian tentang kota menarik untuk dibicarakan. Hal ini tidak lepas dari adanya realitas dari berbagai hal yang menyangkut proses historis terbentuknya sebuah kota. Kota dalam berbagai wujudnya selalu memperlihatkan kecenderungan dan keberlanjutan yang kadang-kadang unik. Pada dasarnya kelahiran suatu kota melalui proses sejarah yang panjang dengan memperlihatkan perkembangan dan perubahan baik pada kondisi fisik maupun non fisik. Sejarah pembentukan kota dan penataan (penggunaan) ruang-ruang kota yang ada memiliki proses yang dinamis.

Selanjutnya Pangeran Mangkubumi membangun kraton sebagai ibukota kerajaan, yang terletak di antara Sungai Code dan Sungai Winanga. Pada tanggal 9 Oktober 1755 dibangunlah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Desa Pacethokan di kawasan Hutan Beringan⁴ (Surjamihardjo, 2000: 20). Nama Ngayogyakarta mirip dengan nama Ayodhya (bahasa Sanskerta, atau disebut Ngayodya dalam bahasa Jawa Baru), yakni nama ibukota dalam epik Ramayana (Ricklefs, 2002: 125). *Karta* berarti makmur; *adi* berarti indah; *ning* berarti dari; atau di; *rat* berarti dunia. Dengan demikian Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Ayodya yang makmur, keindahan dari dunia (Soedarsono, 1997: 106).

4 Tempat tersebut berada dekat dengan Ibukota Kerajaan Mataram Kutagedhe, dan juga dengan Plered.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat*. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian terjadi tanggal 7 Oktober 1756. Di Kraton sendiri tanggal pendiriannya dinyatakan dalam sebuah gambaran dua ular naga yang saling mengait, dan *sengkalan* itu berbunyi “*Dwi Naga Rasa Tunggal*” yang berarti 1682 tahun Jawa (Revianto, 2008: 63). Wilayah Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringan, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu (Kraton Yogyakarta, 2002: 27).

Menurut buku *Peringatan 200 tahun Kota Jogjakarta (1956:18)* dinyatakan bahwa Kasultanan menetapkan berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah pada hari atau 7 Oktober 1756. Pada hari itu dinyatakan adanya *boyongan* Sultan beserta kerabatnya dari Ambarketawang ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan sekaligus menandai dimulainya pemerintahan di kraton baru itu.

Dengan argumentasi di atas maka pemilihan hutan Beringan menjadi ibu kota Ngayogyakarta Hadiningrat pasti didasarkan atas kajian terlebih dahulu baik dalam aspek geografis maupun aspek sosial, ekonomi, dan politik. Namun sampai saat ini belum ditemukan sumber yang menyebutkan siapa saja yang melakukan pengkajian itu sehingga kemudian diputuskan bahwa Hutan Beringan dijadikan sebagai ibu kota Ngayogyakarta. Rickelfs mencoba memberi informasi berhubungan dengan hal ini namun juga tidak cukup lengkap. Menurut Rickelfs tidak lama setelah pertemuan Jatisari, Mangkubumi mengutus seorang dutanya yang bernama Joyowinoto untuk pergi ke Mataram. Tidak lama setelah itu kemudian Mangkubumi menugaskan untuk membat Hutan Beringan dan membangun Pesanggrahan di Ambarketawang. Rickelfs tidak menjelaskan secara rinci siapa Joyowinoto, dengan siapa saja dia pergi ke Mataram, apa tugas utamanya ke Mataram serta apa yang dilaporkannya ke Mangkubumi sekembali dari Mataram (Rickelfs, 2002: 119).

Agaknya pemilihan Hutan Beringan tidak dapat dilepaskan secara langsung dengan kepribadian Sri Sultan HB I. Beberapa sumber menyatakan bahwa Sri Sultan HB I sendirilah yang menentukan bentuk dan ukuran Kraton Ngayogyakarta. Ukuran *jengkal* yang digunakan oleh Sri Sultan HB I untuk menentukan bentuk dan luasnya Kraton dan ibu kota Ngayogyakarta. Konon sampai sekarang ukuran itu masih disimpan di dalam Kraton Ngayogyakarta, dan menjadi salah satu pusaka keramat yang dinamai *Kyai Baladewa* panjangnya kurang lebih 3,25 meter. Tidak hanya masalah ukuran, waktu dan bentuk bangunan-bangunan yang ada di dalam Kraton juga ditentukan sendiri oleh Sultan HB I karena sejak muda waktu masih berada di Kartasura, beliau dikenal sebagai arsitek bangunan.

Kraton yang dibangun dengan konsep *catur gatra* tersebut memiliki empat komponen utama yakni Kraton, alun-alun, masjid dan pasar. Kraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai ruang publik, masjid sebagai ruang religi, dan pasar sebagai ruang ekonomi (Nurhajarini, dkk, 2012). Dalam pembangunan Kraton ini tidak begitu saja dibuat, tetapi ternyata pembangunannya juga menggunakan berbagai pertimbangan, menyangkut aspek strategis, keamanan, filosofis, estetis dan sosial budaya.

Bagian utama dari Kraton Yogyakarta *kedhaton*. Kraton dikelilingi oleh dinding batu bata. Sekeliling Kraton terdapat parit yang dalam. Lima pintu gerbang menghubungkan Kraton dengan wilayah *jaban beteng*/ luar, yaitu : (1) Tarunasura (gerbang timur-laut); (2) Jagasura (gerbang barat-laut); (3) Jagabaya (gerbang barat); (4) Nirbaya (gerbang selatan); dan (5) Madyasura (gerbang timur).

Gerbang Madyasura di sebelah timur tidak pernah dibuka sampai pada tahun 1923. Mungkin gerbang ini dahulu dianggap sangat keramat, karena dari arah timur matahari (Dewa Wisnu) akan muncul di dunia ini (Soedarsono, 1997: 125).

Lokasi Kraton Yogyakarta diungkapkan dengan sebuah puisi Jawa dengan lagu Mijil sebagai berikut:

*Kali Nanga pacingkok ing puri
Gunung Gamping Kulon
Hardi Mrapi ler wetan prenahe
Candi Jonggrang mangungkung ing kali
Plered magiri
Girilaya kidul*

Artinya:

Sungai Winongo membelok waktu mendekati Kraton
Gunung Gamping di sebelah barat
Gunung Merapi di sebelah timur laut
Candi Jonggrang dibangun terlalu dekat dengan sungai
Plered, Imogiri dan Girilaya (Gunung Kidul) terletak disebelah selatan

Sementara denah dari Kraton Yogyakarta diungkapkan dengan sebuah puisi Jawa dengan lagu Mijil sebagai berikut :

*Ing Mataram betengira inggil,
ngubengi kedhaton,
plengkung lima mung papat mengane,
jagang jero toyanira wening,
tur punacak suji,
gayam turut lurung,*

Artinya:

Kraton Mataram dikelilingi dinding tinggi,
Sekeliling kedhaton,
Lima gerbang hanya empat yang terbuka,
Parit yang dalam serta jernih airnya,
Dikelilingi oleh pagar,
Pohon gayam sepanjang jalan (dikutip dari Soedarsono, 1997: 126)

Sebuah Kraton tentu saja harus aman bagi penduduk yang tinggal di dalamnya dan juga aman dari serangan musuh. Oleh karena itu Kraton Kasultanan Yogyakarta dibuat dengan sistem benteng yang berlapis. Bangunan utama Kraton Ngayogyakarta memiliki *cepuri kadhaton (beteng jero)* yang merupakan ring pertahanan pertama. Wilayah yang berada di dalam *cepuri* adalah untuk raja beserta keluarga. Di luar *cepuri* terdapat permukiman warga dan ada sebuah benteng luar dan parit yang mengelilingi benteng merupakan ring pertahanan kedua. Sampai sekarang wilayah yang berada di dalam benteng ini dikenal akrab dengan sebutan wilayah *jeron beteng*. Kedua benteng tersebut

merupakan benteng buatan, sengaja dibangun untuk melindungi wilayah di dalamnya. Benteng kraton di setiap pojok memiliki ruang untuk pengintaian dan juga untuk menempatkan senjata. Dalam *Babad Nitik Ngayogya*, digambarkan mengenai kebijaksanaan dan kearifan Sultan Hamengku Buwono I. Juga disebutkan mengenai kecerdasan beliau terkait ilmu tata kota dan arsitektur. Dalam menentukan posisi Keraton Yogyakarta, menurut catatan itu, beliau mempertimbangkan letak dan keadaan lahan agar berpotensi menyejahterakan dan memberi keamanan untuk penduduk Yogyakarta.

Luas tanah bangunan Kraton sekitar 4.000 m², dikelilingi beberapa gedung yang mempunyai nama berbeda-beda menurut kepentingannya pada masa lampau. Struktur bangunan Kraton dari sejak dibangun oleh Sultan HB I sampai sekarang tidak berubah walaupun ada beberapa renovasi dan penambahan beberapa bangunan pasca pemerintahan HB I. Kraton diapit oleh dua alun-alun, di sebelah utara dan di sebelah selatan. Yang pertama disebut *alun-alur Lor* dan yang kedua disebut dengan *alun-alun Kidul* atau *alun-alun Pengkeran*.

Pada masa lalu, keberadaan kedua alun-alun ini sangat penting bagi negara karena di tempat inilah para prajurit dan perwira berlatih untuk menggunakan senjata dalam pertempuran, menyerbu barisan dengan berkuda, dan strategi-strategi perang lainnya. Sekali dalam setahun, di alun-alun diadakan keramaian *Rampogan* yaitu *ajar-kenal* dengan harimau buas, dengan menggunakan senjata tajam dan tongkat. Pada saat *rampogan* digelar, alun-alun akan dipenuhi masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Pada hakekatnya *rampogan* merupakan sarana untuk melatih ketabahan, keberanian dan kecakapan melawan musuh dan membela diri. Dengan demikian *rampogan* merupakan kelanjutan dari kebiasaan berburu (*mbedag-pikat*) di hutan pada masa itu.

Di tengah-tengah alun-alun lor, terdapat sepasang pohon beringin, masing-masing berkurung. Inilah sebabnya pohon beringin itu kemudian oleh orang-orang disebut dengan *waringin kurung*. Pohon beringin yang satu bernama *Kyai Dewa-daru* dan satunya bernama *Kyai Jaya-daru* atau *Kyai Jana-daru*. Kedua pohon beringin ini melambangkan pertemuan antara hidupnya Dewa dan Umat manusia (*Manunggale Kawula lan Gusti*) (*Kedaulatan Rakyat*, 2009: 3).

Dari Bangsal Witana jika memandang lurus ke arah Utara, sebagaimana biasa dilakukan oleh Sultan HB I ketika duduk *sinewaka* di Sitihihgil Lor, maka akan ditemukan 3 titik kosmis, titik pertama dan kedua adalah sepasang beringin (*Kyai Dewa-Daru* dan *Kyai Jana-Daru*), kemudian ditengah-tengahnya ditemukan titik kosmis ketiga yaitu Tugu, lambang pertemuan antara *Purusha* dan *Pacrity* (positif dan negatif), pokok kekuatan alam. Dengan memusatkan pandangan dan tekad pada ketiga titik itu maka dapat dimengerti dan pahami mengapa Sultan HB I dengan sengaja menciptakan filsafat Tugu dan beringin kurung sepasang.

Selain itu, pada masa itu jika ada warga masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan tertinggi langsung dari Sultan maka dia akan berpakaian serba putih, berkerudung putih dan duduk diantara kedua beringin di alun-alun Utara. Cara yang ditempuh warga masyarakat Yogyakarta itu disebut dengan istilah *Pepe*. Begitu diketahui ada orang *pepe* maka dengan segera akan dijemput dan kemudian dihadapkan kepada Sultan untuk mengadukan sendiri permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Pada waktu itu juga Dewan Pengadilan Agung, yang dihadiri oleh Sultan melakukan sidang untuk memberikan putusan. Apapun keputusan yang diambil dalam sidang itu harus diterima oleh orang yang bersangkutan. Adat *pepe* yang ada di Kesultanan Yogyakarta membuktikan bahwa walaupun Yogyakarta berbentuk monarkhi namun sangat menghargai hak asasi manusia setiap warganya terlepas dari golongan sosial mana mereka berasal.

Di sebelah Barat alun-alun Utara, didirikan sebuah Masjid Besar oleh Sultan HB I bersamaan dengan pembangunan ibu kota. Bentuk Masjid Besar mirip dengan Masjid Demak baik dari atapnya yang terdiri dari 3, maupun bentuk pelatarannya yang mempunyai *blumbang* dan selalu dipenuhi oleh air mengalir sebagai lambang kesucian. Selain itu, berbeda dengan masjid-masjid lain di Indonesia, kecuali Masjid Surakarta, pada bagian kanan dan kiri pelataran sebelah muka, terdapat sepasang bangsal kecil yang khusus disediakan untuk tempat gamelan *Kyai Sekati* dan *Nyai Sekati* pada waktu merayakan hari raya Garebeg Mulud, Syawal, dan Besar. Pada peristiwa itu sepasang gamelan pusaka tersebut akan ditabuh secara bergantian.

Di sekeliling tepi alun-alun berdiri bangsal-bangsal kecil dengan bentuk joglo. Pada masa itu gedung-gedung ini disebut dengan *Pekapalan* yang berfungsi untuk tempat menghadapnya hamba-hamba kasultanan, mulai dari Papatih-Dalem (*Rijkbestuurder*) dan para Bupati sampai kepada Panewu. Tempat itu disebut *Pekapalan* karena di bangunan-bangunan tersebut dipergunakan untuk mempersiapkan kuda-kuda tunggang dari Papatih-Dalem, para Bupati, dan Panewu-Mantri, jika ada upacara kebesaran, atau ketika mereka akan berangkat perang menghadapi musuh.

Jika alun-alun lor lokasinya berada di luar Baluwarti (*ringmuur*) Kraton, maka alun-alun kidul berada di dalam Baluwarti. Sama seperti di alun-alun lor, di alun-alun kidul juga terdapat sepasang *waringin kurung*, namun keadaan yang berada di sekelilingnya jauh berbeda dengan alun-alun lor bahkan terkesan sepi. Hanya ada kegiatan berupa kunjungan-kunjungan dari berbagai daerah untuk melihat gajah yang kandangnya ada di sebelah Barat daya alun-alun.

Sebagai imbingan Bangsal Sitihinggil yang ada di bagian muka Kraton, di sebelah utara alun-alun Selatan juga dibangun Bangsal Sitihinggil. Jika Bangsal Sitihinggil muka (sebelah Utara) untuk kepentingan *Sinaweke*, maka Sitihinggil Selatan hanya digunakan Sultan untuk memeriksa latihan-latihan para perwira dan prajurit yang sedang berlatih di alun-alun Selatan. Pada saat-saat tertentu Sultan bahkan memeriksa kegiatan latihan itu dengan menunggang kuda mengelilingi alun-alun.

Sebagai seorang ahli strategi pertahanan militer, maka ketika Sultan HB I membangun tembok yang mengelilingi Kraton (*ringmuur*) juga dipertimbangkan kekuatannya. Meskipun tembok pagar yang mengelilingi Kraton Yogyakarta dibangun hanya mempunyai tinggi 3,5 meter namun memiliki ketebalan 5 meter dengan ujung-ujungnya berbentuk kupel penjagaan. Di samping pagar tembok dilengkapi dengan *Jagang* (anak sungai) yang cukup dalam, sehingga pembangunannya tidak hanya mengesankan aspek keindahan saja namun juga menekankan aspek pertahanan.

Beteng Kraton Yogyakarta memiliki 5 gerbang. Sebelum masa kemerdekaan gapura-gapura itu pada siang dan malam hari dijaga oleh prajurit Kraton. Gapura-gapura ini disebut dengan nama *Plengkung* karena bentuknya bagian atas hampir separuhnya bulat (*mlengkung*). Dua gapura menghadap ke Utara yaitu yang sebelah Barat di dalam Kampung Ngasem terkenal dengan nama *Jagasura* dan yang sebelah Timur berada didalam Kampung Yudonegaran disebut dengan nama *Tarunasura*. Kemudian gapura yang menghadap ke Barat di dalam Kampung Taman Sari bernama *Jagabaya*, yang menghadap ke Timur didalam Kampung Suryamataraman disebut *Madyasura* dan yang sebelah Selatan bernama *Nirbaya* (dikenal juga dengan *Plengkung Gading*). Jumlah 4 pojok beteng Kraton Yogyakarta dapat ditafsirkan merupakan perwujudan empat dasar perjuangan Mangkubumi dalam menggerakkan semangat rakyat melawan Kompeni dengan semboyan *Sawiji*, *Greget*, *Sungguh* dan *Ora Mingkuh*.

Sebagai bangunan inti atau pusat kosmologi, Kraton terletak di jantung kota dengan luas kira-kira 14.000 m² yang terdiri dari bangunan-bangunan induk dan penunjang, serta halaman dan lapangan. Masing-masing bangunan mempunyai makna dan arti, sesuai dengan fungsi bangunannya. Bangunan-bangunan inti yang ada dalam Kraton antara lain:

1. Alun-alun Selatan
2. Sasana Hinggil
3. Bangsal Kemandungan
4. Bangsal Kemagangan
5. Kedaton/Prabayeksa
6. Bangsal Kencana
7. Bangsal Sri Manganti
8. Bangsal Ponconiti
9. Bangsal Winoto
10. Siti Hinggil
11. Tarub Agung
12. Pagelaran
13. Alun-alun Utara

Untuk menghubungkan satu bangunan dengan bangunan lainnya dibangun pintu gerbang (*regol*). Urutan bangunan dalam Kraton ini juga bisa ditafsirkan sebagai proses kehidupan seorang manusia mulai dari Selatan ke Utara. Mulai dari magang sebagai calon manusia (Kemandungan dan Kemagangan) sampai pada saat menjadi manusia dewasa yang telah akil baligh dan harus di gladi kedigdayaannya (Alun-alun Utara).

Bangunan tempat kediaman Sultan dan kerabatnya disebut Prabayeksa yang selesai dibangun pada tahun 1756. Kemudian menyusul bangunan Siti Hinggil dan Bangsal Pagelaran selesai pada tahun 1757. Sedang *Regol* Donopratopo dan Bangsal Kamagangan selesai dibangun pada tahun 1761 dan 1763. Masjid agung dibangun pada tahun 1771. Benteng besar yang mengelilingi kraton selesai dibangun pada tahun 1777. Bangsal Kencono selesai dibangun pada tahun 1792, dan seterusnya istana kraton Yogyakarta terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Raja pertama Kasultanan Yogyakarta juga membangun sebuah kompleks pertahanan yang cukup unik yakni Taman Sari. Bangunan Taman Sari terletak di sisi tenggara Kraton Yogyakarta. Kompleks ini di desain untuk sebuah tempat peristirahatan raja juga untuk menerima tamu, namun juga memiliki ruang dan jalan-jalan rahasia (*urung-urung* atau jalan bawah tanah), dengan dinding-dinding yang cukup tebal. Taman Sari memiliki pintu air yang dapat dibuka tutup sehingga dapat berfungsi sebagai pertahanan. Apabila pintu air ditutup, maka Tamansari akan berubah menjadi sebuah danau besar (*Kedaulatan Rakyat*, 7 Oktober 2009: 3)

Di samping benteng pertahanan di buatan maka posisi Kraton yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwana I juga memiliki yang pertahanan yang berupa bentang alam, yakni sungai. Kraton diapit beberapa sungai baik di sisi barat maupun sisi timur. Sungai Code dan Sungai Winongo merupakan pertahanan ketiga, Sungai Gajah Uwong dan Sungai Bedhog sebagai ring pertahanan keempat dan Sungai Opak serta Progo sebagai pertahanan kelima. Bentang alam lainnya adalah Gunung Merapi yang menjulang tinggi di bagian utara Kraton Yogyakarta. Dengan adanya gunung tersebut wilayah Kraton menjadi daerah yang subur, karena abu vulkanik. Gunung tersebut di samping sebagai batas alam juga menjadi salah satu simpul yang utara selatan. Di gunung itu pula setiap tahun

Kraton mengadakan upacara tradisi yakni *Labuhan*. Sjoberg (1967:27) berpendapat bahwa syarat wilayah untuk menjadi sebuah kota adalah mempunyai dasar lingkungan yang baik, terletak di wilayah geografis yang menguntungkan, terdapat teknologi yang maju baik pertanian maupun non pertanian, dan ada organisasi sosial yang kompleks dengan struktur ekonomi politik yang sudah maju.

Pembangunan Tamansari yang dilengkapi dengan lorong-lorong bawah tanah sebagai jalan rahasia Adapun letak Kraton yang diapit dua sungai mempunyai aspek teknis bagi perkembangan pertanian, juga mempercepat peresapan air hujan dan menguntungkan bagi pembuatan drainase, sehingga bahaya banjir tidak akan terjadi. Bila ditinjau dari aspek filosofis-religius, penentuan letak Kraton berkaitan erat dengan Sri Sultan Hamengku Buwana I sebagai ahli strategi perang dan memegang nilai historis yang dipercaya berpengaruh pada sikap perilaku dirinya dan kawulanya.

Seting lokasi Kraton secara filosofis merupakan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Dalam hal ini termasuk adanya lima anasir pembentuk, yakni api dari Gunung Merapi, tanah dari Kraton Ngayogyakarta, air dari Laut Selatan, serta angin dan angkasa. Konsep simbol ini merupakan konsep filosofi *sangkan paraning dumadi* (asal mulanya penciptaan) dan *manunggaling kawula Gusti* (manunggalnya kawula dan rajanya). Berbagai lambang di antaranya, kesuburan, ketaatan sultan dan kepada Tuhan serta lambang kesejahteraan dengan Tugu Golong-Gilig (*Kedaulatan Rakyat*, 2009: 3).

Tugu ini didirikan setahun setelah kraton Yogyakarta berdiri, atau sekitar tahun 1756. Pada mulanya Tugu berbentuk silinder (*gilig*) pada tiangnya dan puncaknya berbentuk bulat (*golong*), sehingga disebut *Tugu Golong-Gilig*. Tinggi tugu tersebut awalnya mencapai 25 meter. Tugu Golong-Gilig mempunyai arti semangat persatuan antara rakyat dan penguasa dalam hal ini raja Kraton Jogja dalam melawan penjajahan Belanda. Dalam bahasa jawa disebut *Manunggaling Kawulo Gusti*, yang berarti bersatunya rakyat dan penguasa.



Tugu



Panggung Krapyak

Panggung Krapyak erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kraton Kasultanan Yogyakarta. Bangunan lantai dua yang terbuat dari batu bata tersebut dibangun oleh Sultan Hamengku Buwana I pada tahun 1782 M, ditandai dengan *suryasengkala* (tahun masehi) *paningaling kawicaksanan salingga bathara*.⁵ Panggung itu dibangun bersamaan dengan pembangunan benteng Kraton.

⁵ Suryasengkala merupakan perhitungan angka tahun berdasarkan peredaran matahari. Seperti yang tertera di dalam teks *paningaling kawicaksanan salingga bathara*, artinya *paningal* (mata) mempunyai nilai 2, *kawicaksanan* (kebijaksanaan) memiliki nilai 8, *salingga* (menyatu dalam badan) bernilai 7, *bathara* (dewata) bernilai 1. Pembacaan tahun dimulai dari depan sehingga berarti tahun 1782 M.

Fungsi bangunan itu pada masa lalu adalah untuk tempat beristirahat sultan beserta keluarga dan pengiringnya sewaktu berburu kijang, rusa atau hewan buruan lainnya di hutan. Hutan yang dimaksud berada di sebelah selatan panggung. Kijang-kijang yang berada di hutan dipelihara, dan pada waktu-waktu tertentu kijang itu digiring (*krapyak*).

Panggung Krapyak juga merupakan salah satu bangunan yang berada pada sumbu filosofis utara – selatan dengan Kraton sebagai pusatnya. Dalam sumbu filosofis itu adalah Panggung Krapyak – Kraton – Tugu Pal Putih. Panggung Krapyak merupakan simpul yang berada selatan dan jika diteruskan ke selatan akan sampai ke Pantai Selatan Samudera Hindia. Dari Tugu Pal Putih jika diteruskan ke utara akan sampai ke Gunung Merapi. Sumbu filosofis itu mengandung arti *manunggaling kawula gusti* atau bersatunya rakyat dengan rajanya. Dari sudut agama Islam, sumbu filosofis itu mengandung makna konsep hubungan antara manusia dengan Tuhan dan konsep hubungan antara manusia dengan sesamanya. Tempat-tempat dalam satu sumbu filosofis itu merupakan lokasi-lokasi penting dalam struktur kebudayaan Kraton dan masyarakat. Dari jalur itulah awal pertumbuhan Kota Yogyakarta dan kemudian berkembang ke arah timur barat tatkala jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya berkembang.



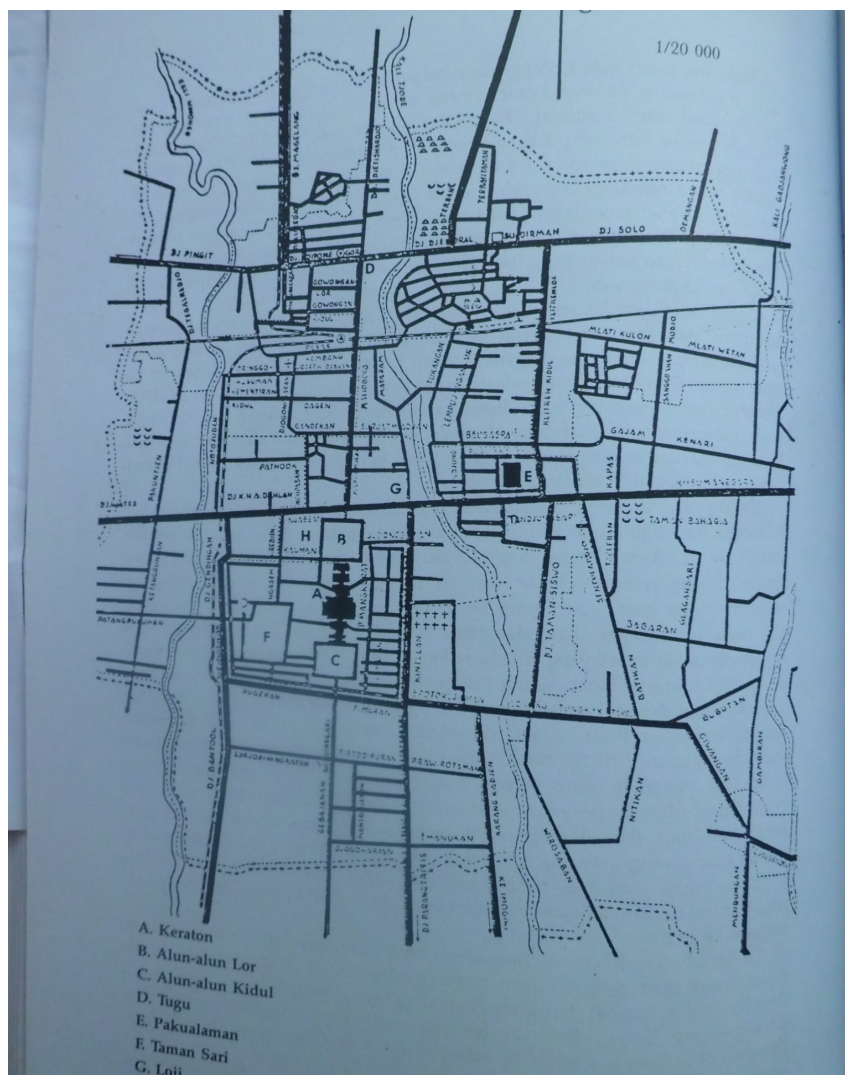
Alun-Alun Utara tahun 1888 (Knaap, 1999:42)

Sri Sultan Hamengkubuwana I kemudian memerintahkan untuk membangun berbagai kampung di sekitar Kraton sebagai tempat tinggal para *abdi dalem*, prajurit, dan sebagainya. Pada mulanya pembangunan kampung tempat tinggal ini dilaksanakan di dalam beteng Kraton, tetapi karena luas lahannya tidak mencukupi maka kemudian ditempatkan di luar benteng (*jaban beteng*) dengan formasi tapal kuda. Adapun kampung-kampung itu antara lain adalah Kampung Wirobrajan yang ditempati prajurit *Wirabraja* sebagai kompi satu, Kampung Dhaengan untuk prajurit *Dhaeng* sebagai kompi dua, Kampung Patangpuluhan untuk prajurit *Patangpuluh* sebagai kompi tiga, Kampung Jogokaryan ditempati prajurit *Jagakarya* sebagai kompi empat, Kampung Prawirotanman ditempati prajurit *Prawiratama* sebagai kompi lima, Kampung Nyutran ditempati prajurit *Nyutra* sebagai kompi enam, Kampung Ketanggungan ditempati prajurit *Ketanggung* sebagai kompi tujuh, dan Kampung Mantrijeron ditempati prajurit *Mantrijero* sebagai kompi delapan. Sedangkan kompi Kepatihan berkedudukan di Bugisan, Kompi Adipati Anom tinggal di Surokarsan dan komandan batalyonnya tinggal di Jlagran (*Kedaulatan Rakyat*, 7 Oktober 2009: 3).

Kawasan *jeron beteng* dipergunakan untuk para *abdi dalem* yang mengurus kerumahtanggaan Kraton. Di antaranya yaitu Kampung Siliran ditempati oleh *abdi dalem Silir*, yang bertugas memelihara lampu, Kampung Gamelan ditempati *abdi dalem Gamel* yang bertugas mengurus kuda-kuda kerajaan, Kampung Patehan dipergunakan para *abdi dalem* yang mengurus minuman, Kampung Langenastran ditempati para *abdi dalem Langenastra* yang bertugas sebagai pengawal raja.

Kota istana memiliki perkembangan yang simetris utara- selatan berkat aliran sungai yang mengalir hampir sejajar dari utara ke selatan yangni Sungai Winongo di sebelah barat dan Sungai Code

di sebelah Timur. Daerah-daerah permukiman dibangun sejajar dengan poros utara selatan. Di sebelah utara ada kampung Pringgakusuman dan Suryowijayan; di sebelah selatan ada Kampung Pugeran, Brotokusuman, Suryadiningratan dan Tirtodipuran. Sebelah timur (timur laut) ada Pakualaman (Lombard, 2005: 111). Di tempat-tempat tertentu terdapat pasar untuk perdagangan. Di samping itu ada pula tempat untuk orang-orang Tionghoa dan dinamakan *Pecinan*, ada pula tempat untuk orang-orang Eropa (Kompeni). Denah ibukota Kasultanan Yogyakarta diatur dengan pedoman keempat arah mata angin dan menurut dua poros besar yang saling memotong dengan tegak lurus. Di jantung kota berdiri istana yang merupakan intinya.



Denah Skematis Yogyakarta (Lombard, 2005: 112)

Pendiri Kasultanan Ngayogyakarta, Hamengkubuwana I disebut oleh Ricklefs (2002: 129) sebagai seorang pembangun yang besar dalam tradisi seorang raja Jawa. Dia pembuat bangunan-bangunan besar dan spektakuler. Seperti yang ditulis Ricklefs berdasarkan catatan dari Hartingh bahwa Hamengkubuwana I telah memerintahkan pembangunan pancuran-pancuran, bukit-bukit buatan dan kanal-kanal air. Bahkan seperti yang masih bisa dilihat sampai sekarang, Tamansari sebuah kompleks pesanggrahan yang tidak hanya indah namun juga kokoh, memiliki unsur religio magis



Masjid Gedhe Kauman tahun 1910

Sumber: media-kitlv.nl

(Sumur Gumuling) dengan jalan bawah tanah (*urung-urung*) yang menghubungkan beberapa bagian. Pada mulanya Tamansari dapat dicapai melalui jalan air dari Kraton itu sendiri dan dihubungkan oleh sebuah kanal yang besar ke sebuah kolam besar dan pulau tiruan di sisi selatan istana (Pulo Gedhong).

Masjid Kauman

Masjid Kauman atau sering disebut Masjid Gedhe Kauman merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang didirikan oleh Sri Sultan

Hamengku Buwana I. Masjid Gedhe didirikan pada tanggal 29 Mei 1773 (dalam prasasti : pada hari Ahad Wage, 6 Robiul'akhir tahun Alip, sengkalan: *Gapura Trus Winayang Jalma* (1699 Jw.=1187 H=1773M). Pemrakarsa adalah Sultan dan Kyai Penghulu Faqih Ibrahim Diponingrat, sedangkan sebagai arsiteknya yang terkenal waktu itu Kyai Wiryokusumo.

IV. MAKNA FILOSOFIS KRATON DAN KOTA YOGYAKARTA

Seperti kerajaan yang lainnya, Kraton Kasultanan Yogyakarta dibangun berdasarkan *worldview* yang merupakan cerminan dari pandangan budaya Islam-Jawa. Dalam pandangan Jawa, pembangunan fisik sebuah kerajaan tidak dapat dipisahkan dari konsep kosmis-religi-magis atas kehidupan alam semesta. Pada dasarnya *wordview* ini ditemukan pada sebuah kepercayaan dalam hubungan paralel antara *makrokosmos* (jagad besar) dan *mikrokosmos* (jagad kecil). Dalam pandangan ini kehidupan manusia berada dibawah pengaruh kekuatan yang berasal dari segala penjuru dunia, bintang-bintang, dan planet lainnya (Kraton Yogyakarta, 2002: 10).

Kekuatan ini dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran atau bencana bagi dunia. Apakah kekuatan itu akan membawa kemakmuran tergantung pada keberhasilan pribadi dalam memimpin harmonisasi kehidupan di dunia. Harmoni antara kerajaan dan alam semesta diperoleh dengan mengelola negara seperti model alam semesta dalam skala kecil. Oleh karena itu spekulasi atas hubungan antara negara dengan alam semesta menjadi sebuah pertanyaan yang penting dalam kehidupan tradisional Kraton Yogyakarta dan di kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar pandangan kosmis-religi-magis pada negara dan kerajaan dapat ditemukan dalam seluruh aspek kehidupan seperti sastra, bahasa, gelar, ritus tradisional, seni, kehidupan religi, arsitek istana, dan tempat beribadah. Pendidikan pra Islam dan Islam telah membaur dalam *worldview* Kraton yang direfleksikan dalam konsep kekuasaan, kedudukan, fungsi, tugas seorang Raja baik pada masa lampau maupun saat ini.

Konsep kekuasaan Raja di Kraton Yogyakarta pada dasarnya sudah terefleksi pada gelar yang digunakan, *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga, Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah*. Gelar ini merupakan simbol dan representasi filosofis kerangka konseptual dari seorang raja, kerajaan, dan kekuasaannya dalam pandangan Islam-Jawa. Konsep *Hamengku Buwono* merupakan simbol dan kekuasaan raja yang mempunyai fungsi untuk melayani dunia.

Konsep gelar raja Kraton Yogyakarta itu mempunyai 3 substansi makna. Pertama, *Hamengku* mengandung makna *ngemong (hangrengkuh)*, melindungi semua warga masyarakat tidak memandang status sosial dan agamanya (hakekat *ambeg adil paramartha*), dan *Senapati ing Ngalaga* tindakan perwira untuk menciptakan dan menjaga harmoni kehidupan, stabilitas, dan perdamaian negara. Kedua, *Hamangku* menandakan sebuah kepemimpinan yang meletakkan kepentingan rakyat diatas segalanya dengan lebih banyak memberi dibandingkan menerima (hakekat *berbudi bawa leksana*), sedangkan *Abdurrahman Sayyidin Panatagama* merepresentasikan tindakan sebagai seorang muslim dalam persaudaraan dengan seluruh muslim lainnya yang mewakili keberadaan Tuhan untuk menjaga norma kehidupan beragama. Ketiga, *Hamengkoni* mengandung makna pengayom yang siap berdiri paling depan menjadi anutan dan tampil bertanggung jawab dengan segala resikonya (*ing ngarso sung tulodho*), sedangkan *Khalifatullah* merepresentasikan tindakan untuk memimpin rakyat dalam segala aspek kehidupan sebagai sebuah manifestasi wakil Tuhan di dunia (Kraton Yogyakarta, 2002: 20).

Penentuan lokasi pembangunan Kraton Yogyakarta menurut beberapa pendapat dipengaruhi oleh pandangan Hindu. Menurut kitab suci agama Hindu, untuk lokasi bangunan suci seperti candi dipilih tempat yang berbeda dengan alam sekitarnya, karena menampakkan kekuasaan dewa dan keajaiban lainnya. Puncak gunung dan lereng bukit, daerah kegiatan vulkanik, dataran tinggi yang menjulang diatas tepi lembah, tepian sungai atau danau, tempat bertemunya dua sungai merupakan ciri-ciri daerah yang baik untuk bangunan suci. Apabila dicermati dengan seksama aliran sungai Progo dan Elo merupakan padanan dari sungai Gangga dan Jamuna di India dan tidak jauh dari tempat itu terletak bangunan suci kota Both Gaya dan stupa Bharhut, di Indonesia mengacu pada keberadaan candi Borobudur. Begitu pula wilayah Yogyakarta yang diapit dua sungai besar, sungai Opak dan sungai Progo di ring paling luar dan sungai Code dan Winongo di ring terdalam. Puncak gunung (gunung Meru) menurut mitologi Hindu merupakan tempat bersemayamnya para dewa, di Yogyakarta diwakili Gunung Merapi dan laut selatan mewakili samudera yang mengelilingi gunung Meru. Gunung sebagai ketenangan tempat suci, dataran pemukiman sebagai aktifitas kehidupan manusia dan laut sebagai tempat pembuangan akhir dari segala sisa di bumi yang hanyut serta dihanyutkan ke laut (Priyono, 2015, 43).

Penerapan konsep kosmologi diatas pada Kraton Yogyakarta dalam skala yang lebih kecil *Jagang* yang mengelilingi beteng Kraton menggambarkan lautan yang mengelilingi Gunung Meru, sedang kompleks Kraton Yogyakarta terletak di pusatnya menggambarkan Gunung Meru itu sendiri. Oleh sebab itu gedhong Indrakila dan Ngendrasana didalam Kraton menggambarkan istana Dewa Indra di puncak gunung Meru. Di lingkungan Kraton Yogyakarta terdapat 2 tempat yang disakralkan yakni gunung Merapi – terletak di sisi utara Kraton- dan Laut Selatan-terletak di sisi selatan Kraton- yang dipercayai sebagai istana Kanjeng Ratu Kidul. Secara kosmologis Kraton Yogyakarta menghadap kearah Gunung Merapi, akan tetapi agar tidak membelakangi laut selatan, maka pada halaman belakang (*pungkuran*) dibuat menyerupai halaman depan dengan membuat alun-alun Selatan dan Siti Hinggil meskipun dengan skala yang lebih kecil (Priyono, 2015, 44).

Salah satu ciri khas kota Yogyakarta adalah pola tata rakit kota yang membujur dengan arah utara-selatan, dengan jalan-jalan yang mengarah ke penjuru mata angin serta berpotongan tegak lurus. Pola itu diperkuat dengan adanya suatu sumbu filosofi dan poros imajiner yang membentang dari arah utara menuju ke selatan, dengan kraton sebagai titik tengahnya. Sumbu itu diwujudkan dalam bentuk bangunan yaitu Tugu (Pal Putih) di utara, ke selatan berupa Jalan Margatama (Jalan Mangkubumi)

dan Margamulya (Malioboro sekarang), kraton, Jalan D.I. Panjaitan, berakhir di Panggung Krapyak. Jika titik awal (Tugu) diteruskan ke utara akan sampai ke Gunung Merapi, sedang jika titik akhir (Panggung Krapyak) diteruskan akan sampai ke Lautan Indonesia. Secara simbolis filosofis, pola penataan wilayah ini melambangkan konsep *hablum minallah – (sangkan paraning dumadi)* dan *hablum minannas (Manunggaling kawula – Gusti)* (Priyono, 2015, 48).

Secara kultural poros Siti Hinggil – Tugu berfungsi arah berkonsentrasi apabila Sultan sedang *lenggah siniwoko* di Siti Hinggil. Jalan poros keberadaan raja dalam menjalani proses kehidupannya, yang dilandasi *manembah manekung* (menyembah secara tulus) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan bersama rakyat (*golong gilig*) (BPCB DIY, t.t.:4). *Golong-gilig* ini diwujudkan dalam bentuk tugu yang dahulu bagian bawahnya berbentuk silindris (*gilig*), dan puncaknya berbentuk bulatan (*golong*). Tugu dalam bentuk tersebut runtuh akibat gempa bumi besar yang melanda Yogyakarta tahun 1867. Bentuk Tugu seperti sekarang ini adalah hasil renovasi pada masa HB VII pada tahun Sapar 1819 J (3 Oktober 1889).

Adapun titik selatan sumbu filosofis tersebut adalah Panggung Krapyak, yaitu sebuah bangunan berlantai dua yang sekarang berdiri di tengah perempatan di ujung jalan D.I. Panjaitan. Bangunan ini dahulu digunakan untuk Krapyak tempat beristirahat bila sultan beserta keluarga dan para pengiring berburu di hutan perburuan, sekarang menjadi perkampungan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengalaman masa lalu ketika masih tinggal di Kraton Surakarta dan perjuangannya dalam peperangan selama lebih kurang 7 tahun, telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang luar biasa mengenai strategi pertahanan dan keamanan bagi Mangkubumi. Pengalaman itulah yang kemudian mempengaruhi dan diterapkan oleh Mangkubumi ketika membangun Kraton Kasultanan dan Kota Yogyakarta pasca Perjanjian Giyanti. Untuk itulah kelemahan-kelemahan yang ada di beberapa Kraton masa Mataram dieliminasi oleh Mangkubumi ketika membangun Kraton Kasultanan Yogyakarta. Lebih dari itu Kraton Yogyakarta benar-benar dijadikan sebagai simbol kosmis, religius, dan magis, baik yang mencerminkan hubungan raja dengan Tuhan maupun raja dengan rakyatnya. Maka tidak mengherankan jika pembangunan Kota Yogyakarta juga tidak terlepas dari simbol-simbol yang mencerminkan pada tujuan akan terciptanya sebuah negeri makmur dan sejahtera.

Tidak hanya unsur yang bersifat kosmologis, pembangunan dan pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta oleh Hamengku Buwono I juga mencerminkan perpaduan unsur sosial, ekonomi, religi, dan budaya. Keempat unsur tersebut ada pada konsep *Catur Gatra Tunggal* tersebut adalah Kraton sebagai pusat pemerintahan dan politik, alun-alun sebagai pusat kegiatan masyarakat (sosial), Masjid Gedhe sebagai simbol religi, dan pasar sebagai pusat perekonomian. Sehingga Kasultanan Yogyakarta dibangun diatas dasar filosofi ideal yang memadukan unsur-unsur yang bersifat duniawi dan ukhrowi. Oleh karena itu tidak mengherankan masyarakat Yogyakarta yang dicita-citakan oleh Hamengku Buwono I adalah masyarakat madani.

B. Saran

Tata letak Kota Yogyakarta yang awal dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I lengkap dengan makna filosofisnya perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas. Hal itu menjadi penting karena perkembangan kota pesat berpotensi besar terjadinya pergeseran dan perubahan makna. Penanda yang berupa urban heritage perlu dijaga kelestariannya, agar ke depan Kota Yogyakarta yang sarat dengan makna filosofis tidak kehilangan ‘ruh’.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, tt. *Keraton Yogyakarta*.

Santoso, RB, et al (2008), *Dari Kabanaran Menuju Yogyakarta*, Yogyakarta, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

Houben, V.H.B (2002), *Kraton dan Kompeni. Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Jogjakarta: Bentang Budaya.

Kedaulatan Rakjat, 7 Oktober 2009.

Knaap, G (1999)., *Cephas, Yogyakarta Photography in the Service of the Sultan*. Leiden: KITLV Press.

Kuntowijiyono (1995), *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Kraton Yogyakarta (2002), *Kraton Jogja: The History and Cultural*, Yogyakarta: Indonesia Marketing Association.

Lombard, D (2005), *Nusa Jawa: Silang Budaya. Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Margana, S (2014).“Biografi Politik Sultan Hamengku Buwana I”. *Makalah*, diseminarkan dalam acara Dialog Kesejarahan, Dinas Kebudayaan DIY, tgl 10-21 Agustus 2014.

Media-kitlv.nl

Moedjanto, G. (2001) “Lahirnya Kesultanan Yogyakarta dan Hamengku Buwana I” dalam Seminar Bulanan Javanologi, Yogyakarta 23 Februari 2001.

Naskah Akademik Hari Jadi Yogyakarta, 2016.

Notosuroto (1986), *Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Nurhajarini, D.R. dkk (2012). *Yogyakarta Dari Hutan Beringan Ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional.

Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun (1956), *Kota Jogjakarta 200 tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*, Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun.

Pemda Kota Yogyakarta, (2017). *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. Biro Tata Pemerintahan, DIY.

- Priyono, U, et al (2015)., *Buku Profil Yogyakarta City of Philosophy*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.
- Ricklefs, M.C (2002). *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749- 1792. Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Sjoberg, Gideon (1967), *The Preindustrial City. Past and Presen*. New York: The Free Press.
- Soedarsono (1997), *Wayang Wong. Drama Tari Ritual Kenegaraan di Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surjomihardjo, A (2000). *Kota Yogyakarta 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Suryo, D. “Dari Vorstenlanden ke DIY: Keseimbangan dan Perubahan”, *Makalah* disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah ke-9, diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala di Jakarta, tgl. 5-7 Juli 2011.